**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL COST* TERHADAP MANAJEMEN LABA**

**(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)**



Oleh :

*Desy Indrasari*

*16061067*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Desy Indrasari

NIM : 16061067

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul : PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL COST* TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelaar akademik baik di Universitas Mercu Buana Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMBY atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(data base),* mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademiskepada perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
4. Bersedia menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Agustus 2020

Yang menyatakan

Desy Indrasari

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL COST* TERHADAP MANAJEMEN LABA**

**(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)**

***EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND POLITICAL COST ON EARNINGS MANAGEMENT***

***(Case Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange)***

**Desy Indrasari**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**desyindra017@gmail.com**

**ABSTRAK**

Dalam akuntansi, manajemen laba bukanlah suatu praktik yang dilarang. Akan tetapi tindakan manajemen laba telah memunculkan berbagai kasus skandal keuangan. *Agency theory* memberikan gambaran bahwa masalah manajemen laba dapat dieliminasi dengan pengawasan sendiri melalui *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional serta *Political Cost* terhadap manajemen laba. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan *Political Cost* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

**Kata kunci: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Political Cost*, Manajemen Laba**

***ABSTRACT***

*In accounting, earnings management is not a prohibited practice. However, earnings management actions have led to various cases of financial scandals. Agency theory illustrates that earnings management problems can be eliminated by self monitoring through Good Corporate Governance. This study aims to determine the effect of the Independent Board of Commissioners, the Audit Committee and Institutional Ownership and Political Cost on earnings management. The object used in this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016 to 2019. Data analysis uses multiple linear regression methods. The results of this study indicate that the Independent Board of Commissioners, the Audit Committee and Political Cost have no effect on earnings management, while Institutional Ownership has a positive effect on earnings management.*

***Keywords: Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Institutional Ownership, Political Cost, Profit Managemen***

**PENDAHULUAN**

Penyajian terstruktur yang menunjukkan kondisi finansial dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, prestasi kerja manajemen keuangan dan pengelolaan kas perusahaan yang dapat membantu pengguna laporan untuk membuat keputusan dalam suatu peluang bisnis disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bukti pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya perusahaan (Diana & Setiawati, 2017).

Peranan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pihak intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. *Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholders. *Political Cost* merupakan biaya yang muncul dari konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, misalnya subsidi pemerintah, tuntutan buruh, pembayaran pajak, dan sebagainya. *Political Cost* adalah hipotesis yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat perioda kemakmuran yang tinggi.

Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu (Wirakusuma, 2016). Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan tertentu. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Abdilah et al, 2016).

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Teori Agensi *(Agency Theory)***

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* (Widi, 2015). *Agent* merupakan pihak yang mengelola perusahaan, sedangkan *principal* merupakan pihak pemegang saham. Hubungan ini muncul ketika pihak *principal* memberikan wewenang atau tugas kepada pihak *agents*. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepentingan akan rentan terhadap konflik keagenan. Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Asimetri informasi antara agent dan principal dapat memicu manajer untuk melakukan *disfuctional behavior*.

**Teori Akuntansi Positif**

Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1978) dalam Puteri (2019), teori akuntansi positif meramalkan pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya individu. Teori akuntansi positif menjelaskan mengenai fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, teori akuntansi positif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang akan terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Scott (2009) menyebutkan bahwa *positive accounting theory is concered with predicting such as actions as the choices of accounting standars*. Teori akuntansi positif berhubungan dengan prediksi suatu keputusan dalam prinsip akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer akan memberikan respon terhadap standar akuntansi yang baru.

**Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonisasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingan (Manossoh, 2016). Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* *(FCGI),* *Corporate Governance* adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan intenal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi, 2016).

*Good Corporate Governance* merupakan suatu alat yang digunakan guna membangun persaingan yang sehat dan penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi suatu perusahaan. Inti dari *Good Corporate Governance* adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, yaitu untuk mengetahui masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya investor dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. Mekanisme *Good Corporate Governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menyelaraskan hubungan antara *principal* dan *agent* dengan meminimalkan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dan *information asymmetri* antara *agent* dan *principal*.

**Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris Independen adalah bagian Dewan Komisaris yang pada umumnya berfungsi untuk mengawasi manjemen perusahaan. Hadirnya Komisaris Independen diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif, sehingga dapat mengurangi praktik manjemen laba (Sinaga, 2018). Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan betanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*, agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif (Hamdani, 2016). Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu sehingga status independen Dewan Komisaris dapat mengurangi praktik kecurangan yang dapat merugikan para pemegang saham atau pihak lainnya (Fauziyah, 2017).

**Komite Audit**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya (Rahardjo, 2018). Bagi pengelolaan perusahaan keberadaan Komite Audit sangat penting dan merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Komite Audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen dalam menengahi masalah pengendalian. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik, anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Independen dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris Independen yang bertugas sebagai penengah antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Komite Audit juga bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajer perusahaan dalam mengelola laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat Komite Audit adalah sebagai berikut: a.) Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit, b.) Komite Audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, c.) Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas pelaksanaan *Corporate Governance*.

**Kepemilikan Institusional**

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *stakeholder*. Kepemilikan Institusional berperan dalam salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* dalam mengurangi tindakan manjemen laba (Abduh dan Rusilati, 2018). Kepemilikan Institusional meliputi investasi, asuransi, bank dan pemerintah yang menanamkan modalnya dalam perusahaan biasanya berupa saham dan ikut andil dalam pengambilan keputusan.

**Political Cost**

Perusahaan yang besar dengan tingkat laba yang tinggi lebih banyak dijadikan obyek implementasi peraturan maupun kebijakan pemerintah, seperti pengenaan pajak penghasilan tinggi, diwajibkan untuk memenuhi standar kinerja yang lebih tinggi seperti tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sebagainya. Perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang. Sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan.

**Manajemen Laba**

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan tertentu. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Abdilah et al, 2016). Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan. Tidak semua tindakan manajer dalam mengolah manajemen laba diterima, sejauh yang dilakukan manajer masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi dengan pemilihan metode dan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhannya yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Tujuan manajemen laba adalah untuk mengelabuhi para pemakai laporan keuangan untuk percaya dengan informasi tentang keuntungan yang didapatkan perusahaan.

Manajemen laba dalam sebuah perusahaan yaitu perilaku manajer yang melakukan pemalsuan laporan keuangan dengan sengaja akan tetapi masih dalam batas yang ditetapkan oleh prinsip akuntansi dengan memiliki tujuan pemberian informasi yang dapat menyesatkan *stakeholder* untuk kepentingan manajer sendiri (Azizi et. al, 2018). Perilaku manajer dalam mengubah laporan keuangan terutama laba yang didapatkan perusahaan dengan tujuan untuk mengelabuhi *stakeholder* karena untuk kepentingan dirinya dianggap wajar apabila dalam pengelolaan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dengan alasan yang masih dapat ditolerir.

**Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba**

Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Wijaya, 2017). Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat konfik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dewan Komisaris Independen berfungsi sebagai penasehat yang memberikan saran dan masukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Dewan Komisaris Independen mampu melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta *Good Corporate Governance*. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Independen akan menjadikan manajer lebih berhati-hati dan transparan dalam menjalankan perusahaan yang mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance*.Komisaris Independen memberikan masukan dan arahan kepada manajer sehingga manajer akan meminimalisir praktik manajemen laba. Arahan yang diberikan kepada manajer dapat berupa informasi dan peraturan dalam mengelola manajemen laba sesuai standar dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mangkusuryo dan Jati (2018) dan Abduh dan Rusliati (2018) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

**Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajeman Laba**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dalam pengelolaan manajemen laba perusahaan. Komite Audit mempunyai tanggungjawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggungjawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Seiring berjalannya Komite Audit yang baik, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisir (Dustriyani dan Nazar, 2015). Peran Komite Audit adalah sebagai penghantar komunikasi antara auditor internal dan auditor eksternal, serta Dewan Direksi dan semua ruang lingkup audit baik itu hasil audit, kontrol keuangan internal beserta informasi keuangan untuk dipublikasikan.

Komite Audit dapat mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak *principal* dan *agent* yang memiliki perilaku dan tujuan yang berbeda dalam perusahaan. Komite Audit diharapkan dapat menengahi atau memberikan masukan baik bagi manajer maupun pemilik saham dalam mencapai tujuannya agar keduanya saling mendukung. Pengawasan manajer perusahaan dalam melakukan aktivitasnya dalam mengelola manjemen keuangan pada perusahaan. Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dapat membantu dalam pengawasan dan pengontrolan terhadap manajer dalam mengelola manajemen laba pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Komite Audit, maka konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisir.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Abduh dan Rusliati (2018) dan Mangkusuryo dan Jati (2018) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

**Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba**

Kepemilikan Institusional adalah presentase saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar. Kehadiran investor institusional memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dan kebijakan perusahaan. Tindakan pengawasan tersebut dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan agar dapat mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer (Lestari dan Muranto, 2017).

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Peningkatan kepemilikan saham oleh institusional diharapkan manajer mampu bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotiviasi untuk meningkatkan kinerja. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusi dalam perusahaan, semakin rendah tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan Institusional pada perusahaan dapat memberikan pengawasan kepada manajer yang dapat membantu dalam memfokuskan pada keuntungan yang didapatkan perusahaan dan dapat mengurangi asimetri informasi pada manajemen dan perusahaan.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2016) dan Pratiwi (2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

**Pengaruh *Political Cost* terhadap Manajemen Laba**

*Political Cost Hypothesis*, semakin besar laba, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba, misalnya untuk menekan biaya pajak (Wibowo dan Herawaty, 2019). Perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat perioda kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah. *Political Cost* muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Motivasi dalam melakukan manajemen laba diantaranya adalah motivasi pasar modal karena adanya insentif bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan tujuan mempengaruhi kinerja harga saham dalam jangka pendek.

Zimmerman dalam Handayani dan Rachadi (2016) menyarankan untuk menggunakan proksi ukuran perusahaan dalam kerangka *Political Cost*. Menurut Rianto dalam Agustia dan Suryani (2018) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar. Suatu perusahaan yang lebih besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualannya dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan untuk memakai dana eksternal juga semakin besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar dan salah satu alternatif pemenuhan dananya adalah dengan menggunakan dana eksternal yaitu dengan menggunakan utang.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2017) dan Firdaus (2019) yang menyatakan bahwa *Political cost* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: *Political Cost* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari pihak ketiga melalui media perantara yang diakses dari website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan juga dari *website* perusahaan terkait. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling,* dengan jumlah sampel 19 perusahaan. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI secara berturut-turut selama periode tahun 2016 sampai 2019, Perusahaan yang tidak mengalami laba, menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap yang berakhir pada 31 desember dan menyediakan informasi secara lengkap terhadap variable penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu dewan komisaris independen, dan komite audit, kepemilikan institusional dan *political cost*. Variabel dependen manajemen laba*.* Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

**HASIL PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskriptif suatu data yang digambarkan dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai deviasi. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dengan proksi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional serta *Political Cost* sebagai variabel independendan manajemen laba sebagai variabel dependen. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Dewan Komisiaris Independen | 76 | .3333300 | .6666600 | .441916316 | .0815972168 |
| Komite Audit | 76 | 3 | 4 | 3.07 | .250 |
| Kepemilikan Institusional | 76 | .012972 | .997112 | .68460045 | .226931670 |
| Political Cost | 76 | 20.30 | 30.64 | 26.8267 | 2.75946 |
| Manajemen Laba | 76 | -.068190 | .308025 | .06983255 | .078860753 |
| Valid N (listwise) | 76 |  |  |  |  |

*Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020*

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel, baik itu variabel dependen maupun variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas:

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 76 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | .07145729 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .096 |
| Positive | .096 |
| Negative | -.039 |
| Test Statistic | | .096 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .080c |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

*Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020*

Berdasar tabel 4.4, hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,080 yang berarti lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel independen pada model regresi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* > 0,10 atau jika VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**

**Hasil uji Multikolinearitas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .099 | .134 |  | .740 | .462 |  |  |
| Dewan Komisiaris Independen | -.109 | .114 | -.112 | -.956 | .342 | .836 | 1.197 |
| Komite Audit | .004 | .034 | .013 | .122 | .903 | .972 | 1.028 |
| Kepemilikan Institusional | .147 | .040 | .423 | 3.683 | .000 | .875 | 1.142 |
| Political Cost | -.004 | .004 | -.124 | -1.006 | .318 | .758 | 1.319 |
| 1. Dependent Variable: Manajemen Laba | | | | | | | | |

*Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020*

Dari tabel 4.5, dapat dilihat bahwa variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai VIF < 10 yaitu 1,197. Variabel Komite Audit memiliki nilai VIF < 10 yaitu 1,028. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai VIF < 10 yaitu 1,142. Variabel *Political Cost* memiliki VIF < 10 yaitu 1,319. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian sudah memenuhi uji multikolinearitas dan tidak terjadi multikolinearitas didalamnya yang berarti tidak ada hubungan antara variabel independen yang satu dengan yang lain.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat atau menguji dimana variabel dependen atau model regresi tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun sesudahnya. Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin- Watson (DW). Penilaian ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat kriteria Durbin-Watson (DW) dengan tingkat signifikansi 5%. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi yang mana disajikan dalam table Durbin-Watson (DW):

**Tabel 4.6**

**Hasil uji Autokorelasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summaryb** | | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .423a | .179 | .133 | .073442596 | 1.722 |
| a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Political Cost | | | | | |
| b. Dependent Variable: Manajemen Laba | | | | | |

*Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020*

Nilai Durbin-Watson pada tabel 4.5 menunjukkan angka 1,722. Tanpa diketahui sebelumya nilai dU yaitu 1,7701. Maka didapatkan rumus sebagai berikut:

dU < dW < 4 – Du

1,7701 < 1,7722 < 2,2299

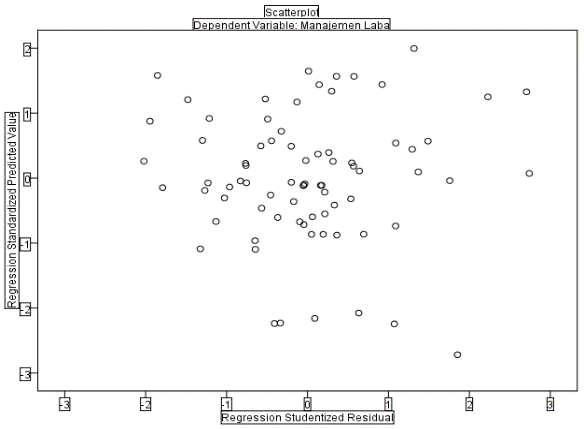
Hasil angka diatas telah memenuhi syarat untuk uji autokorelasi yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antara residual pengamatan yang satu dengan yang lain.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Pada penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot pada Scatterplot. Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:

**Gambar 4.1**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber: Hasil Olah Data, 2020*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatterplot yang ditunjukkan pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**PENGUJIAN HIPOTESIS**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan jugacmenunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujian regresi linier berganda:

**Tabel 4.7**

**Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | .099 | .134 |  | .740 | .462 |
| Dewan Komisiaris Independen | -.109 | .114 | -.112 | -.956 | .342 |
| Komite Audit | .004 | .034 | .013 | .122 | .903 |
| Kepemilikan Institusional | .147 | .040 | .423 | 3.683 | .000 |
| Political Cost | -.004 | .004 | -.124 | -1.006 | .318 |
| a. Dependent Variable: Manajemen Laba | | | | | | |

*Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil regresi berganda pada tabel 4.8 dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

**ML = 0,099 - 0,109 (DKI) + 0,004 (KA) + 0,147 (KI) – 0,004 (PC) + ε**

Penjelasan hasil model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (α) = 0,099. Artinya jika variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan *Political Cost* konstan atau tetap, maka manajemen laba akan sebesar 0,099.
2. Koefisien Dewan Komisaris Independen = -0,109 dapat diartikan bahwa jika terdapat peningkatan pada variabel Dewan Komisaris Independen maka manajemen laba akan menurun sebesar 0,109.
3. Koefisien Komite Audit = 0,004 dapat diartikan bahwa jika terdapat peningkatan pada variabel Komite Audit maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,004.
4. Koefisien Kepemilikan Institusional = 0,147 dapat diartikan bahwa jika terdapat peningkatan pada variabel Kepemilikan Institusional maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,147.
5. Koefisien *Political Cost* = -0,004 dapat diartikan bahwa jika terdapat peningkatan pada variabel *Political Cost* maka manajemen laba akan menurun sebesar 0,004.

**Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial), yaitu menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil uji signifikansi uji t (parsial) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

**Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | .099 | .134 |  | .740 | .462 |
| Dewan Komisiaris Independen | -.109 | .114 | -.112 | -.956 | .342 |
| Komite Audit | .004 | .034 | .013 | .122 | .903 |
| Kepemilikan Institusional | .147 | .040 | .423 | 3.683 | .000 |
| Political Cost | -.004 | .004 | -.124 | -1.006 | .318 |
| a. Dependent Variable: Manajemen Laba | | | | | | |

*Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020*

1. Berdasarkan tabel yang dihasilkan pada tabel 4.9, maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,099, menunjukkan bahwa variabel manajemen laba tanpa dipengaruhi oleh variabel independen akan bernilai 0,099.
2. Berdasarkan tabel 4.9, variabel Dewan Komisaris Independen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,342. Nilai signifikansi 0,342 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak, yang artinya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Berdasarkan tabel 4.9, variabel Komite Audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,903. Nilai signifikansi 0,903 lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak yang artinya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
4. Berdasarkan tabel 4.9, variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima yang artinya Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
5. Berdasarkan tabel 4.9, variabel *Political Cost* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,318. Nilai signifikansi 0,318 lebih besar dari 0,05 sehingga H4 ditolak yang artinya *Political Cost* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

**PEMBAHASAN**

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Dewan Komisaris Independen diukur berdasarkan persentase jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Dari hasil penelitian ini pada tabel 4.9 nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,342 > 0,05. Sehingga H1 di tolak, artinya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Ermawati dan Anggraini (2020) yang menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktik manajemen laba dan pengawasan yang dilakukan komisaris independen semakin berkualitas yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan pembentukan pengangkatan Komisaris Independen oleh perusahaan hanya memenuhi peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 yang menyatakan bahwa “perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen. Adapun hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2016) dan Pratiwi (2016) yang sama-sama menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut Abdillah (2016) penempatan Dewan Komisaris Independen sendiri dalam suatu perusahaan dimungkinkan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal saja.

1. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Dari hasil penelitian pada tabel 4.9 nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,342 > 0,05. Sehingga H2 ditolak, artinya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berarti menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit yang ada di perusahaan belum mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan rata-rata perusahaan dalam penelitian ini memiliki jumlah susunan Komite Audit sebanyak tiga orang sehingga mungkin perusahaan menggunakan Komite Audit hanya untuk memenuhi syarat yang diajukan pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Dewi S dan Khoiruddin (2016) bahwa dengan adanya pembentukan Komite Audit sebagai pemenuhan regulasi atau syarat tersebut, tugas dan fungsi dari masing-masing elemen menjadi belum atau tidak jelas sehingga keberadaan Komite Audit kurang efektif dalam memonitor kinerja manajemen dan dalam aspek pengendalian perusahaan.

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Dari hasil penelitian pada tabel 4.9 nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga H3 diterima, artinya Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian mendukung teori yang dikemukakan oleh Suranta dalam Asward dan Lina (2015) bahwa Kepemilikan Institusional berperan sebagai salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* dalam mengurangi tindakan manajemen laba.

Kepemilikan Institusional yang menanamkan saham pada perusahaan dapat mengamati secara langsung aktivitas manajer dalam mengelola laporan keuangan. Sehingga keputusan yang nantinya akan diambil menjadi lebih efektif, karena Kepemilikan Instituisonal ikut andil dalam pengambilan keputusan atas laporan keuangan yang ada pada perusahaan. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh manajer akan segera diketahui oleh pemilik saham yang berada di perusahaan tersebut.

1. Pengaruh *Political Cost* terhadap Manajemen Laba

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Political Cost* yang di hitung dari ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Dari hasil penelitian pada tabel 4.9 nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,318 > 0,05. Sehingga H4 ditolak, artinya *Political Cost* di hitung dari ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba, karena perusahaan besar lebih banyak memiliki asset dan memungkinkan banyak asset yang tidak dikelola dengan baik sehingga kemungkinan kesalahan dalam mengungkapan total aset dalam perusahaan tersebut. Hasil penelitian mendukung teori yang dikemukakan oleh Astuti (2017) bahwa bahwa semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan menurunkan tingkat manajemen laba di perusahaan tersebut.

Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan oleh pengawasan yang ketat dari pemerintah, analis, dan investor yang ikut menjalankan perusahaan menyebabkan manajer tidak berani untuk melakukan praktik manajemen laba. Ketatnya pengawasan akan menghambat manajer melakukan praktik manajemen laba, karena besar kemungkinan akan diketahui oleh pemerintah, analis, dan investor sehingga hal ini dapat merusak citra dan kredibilitas manajer perusahaan tersebut. Sehingga manajer-manajer perusahaan yang berukuran besar dan kecil tidak berani untuk melakukan praktik manajemen laba (Sari, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2018) dan Gunawan, et al (2015) yang menyatakan bahwa *Poltical Cost* yang di hitung dari ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

**KETERBATASAN**

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode tahun 2016-2019.
2. Penelitian ini pembahasannya lebih ditekankan pada keterkaitan antara variabel *Good Corporate Governance* (dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan *political cost*) yang diuji pengaruhnya terhadap variable manajeman laba.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
4. *Political Cost* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

**SARAN**

1. Para investor sebaiknya tidak hanya terfokus pada informasi laba karena adanya komponen akrual yang dapat diatur dengan menggunakan pertimbangan manajer untuk kepentingan pribadi. Para investor perlu memperhatikan informasi non keuangan yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perusahaan tersebut dalam pengambilan keputusan misalnya Komite Audit, proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional serta *Political Cost.*
2. Bagi perusahaan diharapkan dapat menerapkan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaannya dan bagi perusahaan yang sudah menerapkan *Good Corporate Governance* diharapkan penerapan *Good Corporate Governance* tersebut sesuai dengan tujuan dikeluarkannya *Good Corporate Governance* yaitu agar terciptanya perusahaan yang sehat dan bersih. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas Komite Audit. Karena Komite Audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan Dewan Komisaris maupun pihak ekstern lainnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain seperti Auditor Internal, Komposisi Dewan Direksi dan Kepemilikan Terkonsentrasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abduh, M. M., & Rusliati, E. (2018). Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Binis dan Manajemen Universitas Pasundan*, 11(2), 30–37.

Azizi et al, Ahmad. (2018). E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-JRA* Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 7(1), 32–45.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.

Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Good Corporate GovernanceTeori dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance*. Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fauziyah, Nuriyatun dan Isroah. (2017). “Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Rill Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”. *Jurnal Profita*. Edisi 2. Hal. 1-14.

Puteri, Dhea Permata. (2019). Efek Good Corporate Governance, Konservatisame Akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di CGPI Tahun 2013-2017). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jember

Rahardjo, S. S. (2018). *Etika Dalam Bisnis Dan Profesi Akuntan Dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sinaga, M. (2018). The Effect Of Good Corporate Governance, Leverage, And Profitability With As a Variable Moderating (Empirical Study On Manufacturing Company). *Accounting Analysis Journal*, 1–9.

Wibowo, Lea Wahyuti dan V.Herawaty. (2019). *Analisis Kinerja Keungan yang Mempengaruhi Manajeman Laba Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019, 8696 Buku 2: ”Sosial dan Humaniora“.

Widi, K. G. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di LAPORAN KEUANGAN. *DeReMa jurnal Manajemen.*

Wirakusuma, D. K. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktek Manajemen Laba*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*